

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal, 1962, *Hukum Pidana*, Makasar, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1986, *Kuhap Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- , 1978, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi & Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, *Sejarah Pembentukan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gani, Nico, 1984, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ranoemihardja, R. Aang, 1983, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*, Tarsito, Bandung.
- Redaksi Sinar Grafika, 2008, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodipoetro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemadipradja, R. Achmad S, 1990, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Makalah dan Skripsi

Direktorat Hukum dan HAM Kementerian PPN/ Bappenas, 2013, *Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Pembangunan Hukum Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.

Hasil Lokakarya Hal-hal Baru yang Terkandung dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 1983.

Nugroho, Agung Kusumo, 2008, *Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Anak Pidana*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pasaribu, Solafide Christova, 2013, *Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Eksekusi Putusan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sahati, 1997, *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Kaitannya dengan Pembinaan Narapidana di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Bagian Keadilan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sari, Desi Perdani Yuris Puspita, 2010, *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)*, Penelitian Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Suyanto, Sri Oeripah, 1995, *Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Jawa Tengah*, Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Witjaksono, Hani, 2010, *Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana oleh Hakim Penagawas dan Pengamat Studi Kasus di Lapas Sleman*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Ordonansi Tahun 1926 Nomor 487 tentang Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1926 Nomor 487

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisis Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 009/KMA/SKB/V/2010, Jaksa Agung RI Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor B/14/V/2010, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-35.UM.03.01/TAHUN 2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Surat Kesepahaman Bersama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 17/UM.02.02/II/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor 134/0.5.24/EP/2/02/2011, Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Nomor 01/11/2011, Kepala Rumah Tahanan Ponorogo Nomor W10.E.16.UM.03.01-174, Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Madiun Nomor W10.E.13.UM.03.01-178 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Wilayah Hukum Ponorogo

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi tahun 2015

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi tahun 2013

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dengan Nomor Register Perkara No.30/Pid.Sus/2012/PN.Yk. atas nama terpidana Lien Inawati Binti Lie Lion Seng.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor Register Perkara No.205/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. atas nama terpidana Alip Wahyu Nugroho bin Pairan, dkk.

Website

<http://etd.eprints.ums.ac.id/9457/1/C100060094.pdf>., diakses pada tanggal 30 Maret 2012.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/V10M2010%20Dessi%20Perdani%20Yuris%20Puspita%20Sari.pdf>., diakses pada tanggal 30 Maret 2012.

<http://icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhp/>, diakses pada tanggal 3 September 2015.

<http://news.detik.com/read/2012/02/22/174252/1849331/10/2/ini-dia-lapas-overcapacity-di-indonesia>., diakses pada tanggal 22 Juni 2014.